



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM KOTA BATAM.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewisadahi beban kerja yang kecil.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Instalasi Farmasi.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Batam.
11. Instalasi Farmasi adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di Dinas, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit/puskesmas, Instalasi Farmasi dikepalai oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang asisten apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan.

### Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut
  - a. menyusun perencanaan teknis dan program kerja UPTD;
  - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan Instalasi Farmasi tahunan;
  - c. melaksanakan pemeliharaan Instalasi Farmasi yang meliputi bangunan, prasarana, sarana Instalasi Farmasi;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;
  - e. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai pedoman yang ditetapkan;
  - f. melaksanakan penatausahaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi;
  - g. mengendalikan pelayanan publik UPTD berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

- h. melaksanakan fasilitasi dan koordniasi pendidikan/pelatihan bidang farmasi melalui kepegawaian sekretariat Dinas Kesehatan;
- i. melaksanakan fasilitasi tersusunnya standar pengobatan dan formularium Instalasi Farmasi;
- j. melaksanakan penelitian dan pengembangan teknis lingkup bidang kefarmasian;
- k. melaksanakan pengawasan berdasarkan aturan kefarmasian yang berlaku;
- l. melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup tugas teknis penunjang UPTD;
- m. melaksanakan standar dan membuat Operasional Prosedur, lingkup Pengelolaan Instalasi Farmasi;
- n. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan SKPD terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan Instalasi Farmasi;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan Instalasi Farmasi;
- p. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pergelolaan Instalasi Farmasi;
- q. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. membantu menyusun perencanaan teknis dan program kerja UPTD;

- b. membantu melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;
- c. membantu melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas;
- d. membantu mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- e. membantu menyusun rencana teknis, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- f. membantu menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis ketutuhan, penyusunan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- g. membantu memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan;
- h. membantu melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan/pelatihan bidang farmasi melalui kepegawaian sekretariat Dinas;
- i. membantu melaksanakan fasilitasi tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit;
- j. membantu melaksanakan penelitian dan pengembangan teknis lingkup bidang kefarmasian;
- k. membantu melaksanakan pengawasan berdasarkan aturan kefarmasian yang berlaku;
- l. membantu melaksanakan tugas teknis operasional dalam lingkup evaluasi, data dan informasi hasil kegiatan teknis penunjang Instalasi Farmasi;
- m. membantu melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup tugas teknis penunjang UPTD;
- n. membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur lingkup pengelolaan Instalasi Farmasi;
- o. membantu melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan SKPD terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan Instalasi Farmasi;

- p. membantu menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD;
- q. membantu melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada Sekretariat Dinas; dan
- r. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

##### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

##### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup Instalasi Farmasi.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan Instalasi Farmasi.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD Instalasi Farmasi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan tugas teknis pengelolaan perbekalan farmasi sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya meliputi; pemilihan, perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan tugas teknis lingkup standar pelayanan kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, obat, resep, alat kesehatan, bahan medis pakai, pelayanan

farmasi klinik sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas teknis lingkup fungsional kefarmasiannya.

#### Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A; dan
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

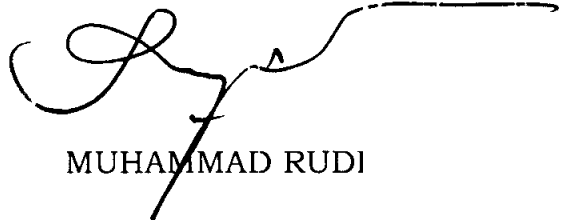
### Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

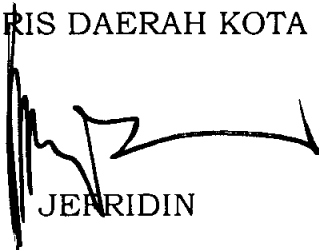
Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

  
MUHAMMAD RUDI

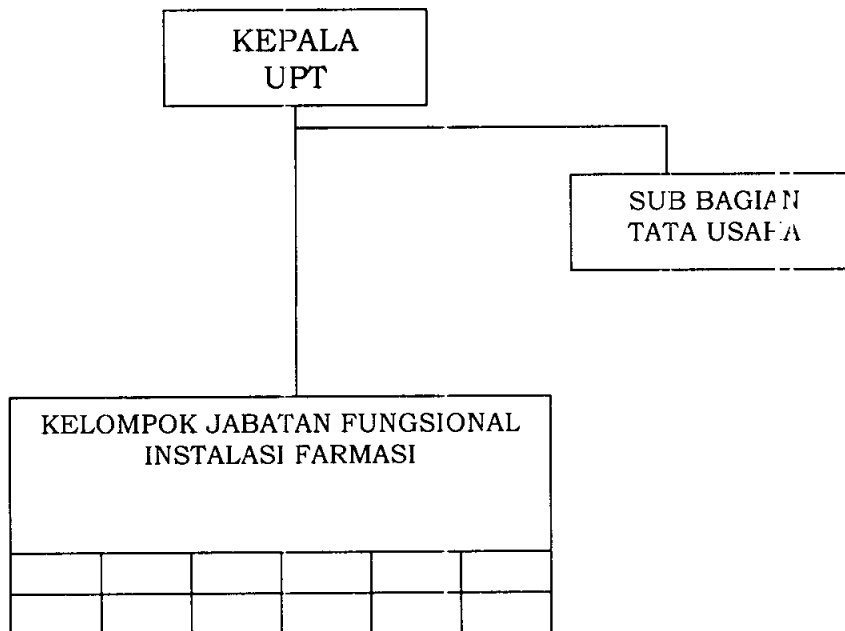
Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

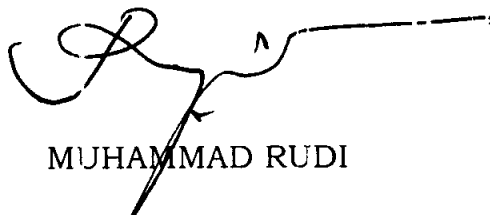
  
JERRIDIN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 6 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
INSTALASI FARMASI KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI